PREVIEW SIDANG AKHIR

ARAHAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA KORIDOR PASAR BESAR KOTA MALANG

OLEH : AKHMAD RADITYA M.F

NRP : 3611100002

DOSEN PEMBIMBING : DIAN RAHMAWATI ST. MT.

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2015

INTRO SEKTOR INFORMAL

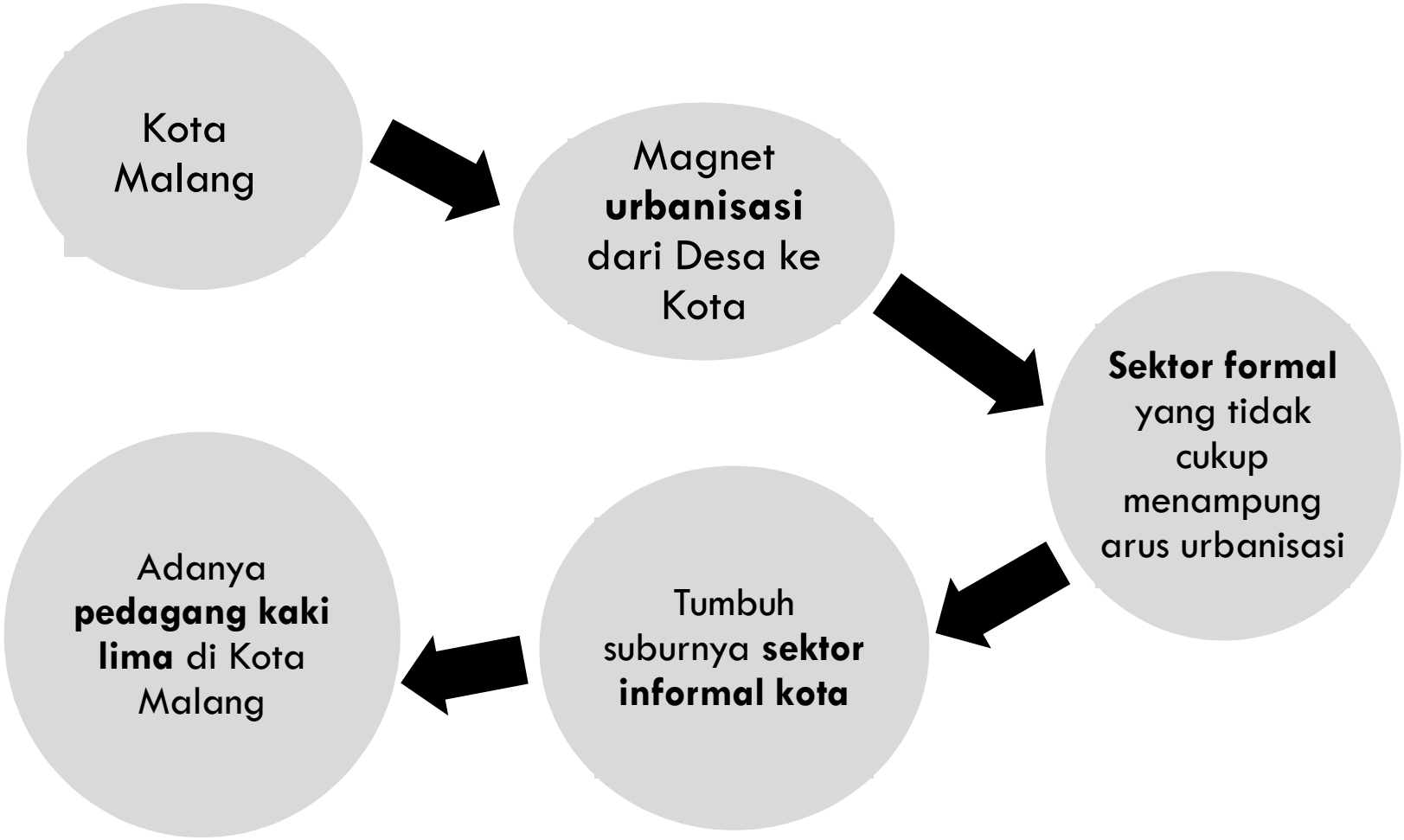

LATAR BELAKANG

PKL dalam kegiatan berdagang mengunakan **fasilitas umum** sebagai lokasi berjualan

PKL **menggangu pengguna jalan** dan **pejalan kaki** terlebih lagi menimbulkan **kemacetan**

Terjadi kesemrawutan yang diakibatkan **bercampur aduknya kegiatan** pedagang dalam satu lokasi serta **tidak tertatanya** dagangan PKl sehingga menyebabkan kesan **kumuh**

Belum adanya upaya dari pemerintah Kota Malang untuk menata Kegiatan PKL di lokasi tersebut

RUMUSAN MASALAH

factor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penataan kegiatan pedagang kaki lima (PKL) pada koridor jalan pasar besar Kota Malang ?

TUJUAN

Merumuskan arahan penataan kegiatan Pedagang kaki Lima (PKL) pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang.?

SASARAN

1. **Mengidentifikasi karakteristik** pedagang kaki lima koridor Jalan Pasar Besar Malang.
2. **Menganalisa factor-faktor yang berpengaruh** dalam pentaan kegiatan pedagang kaki lima jalan pasar besar kota malang.
3. **Merumuskan arahan penataan** pedagang kaki lima pada jalan pasar besar kota malang.

WILAYAH PENELITIAN

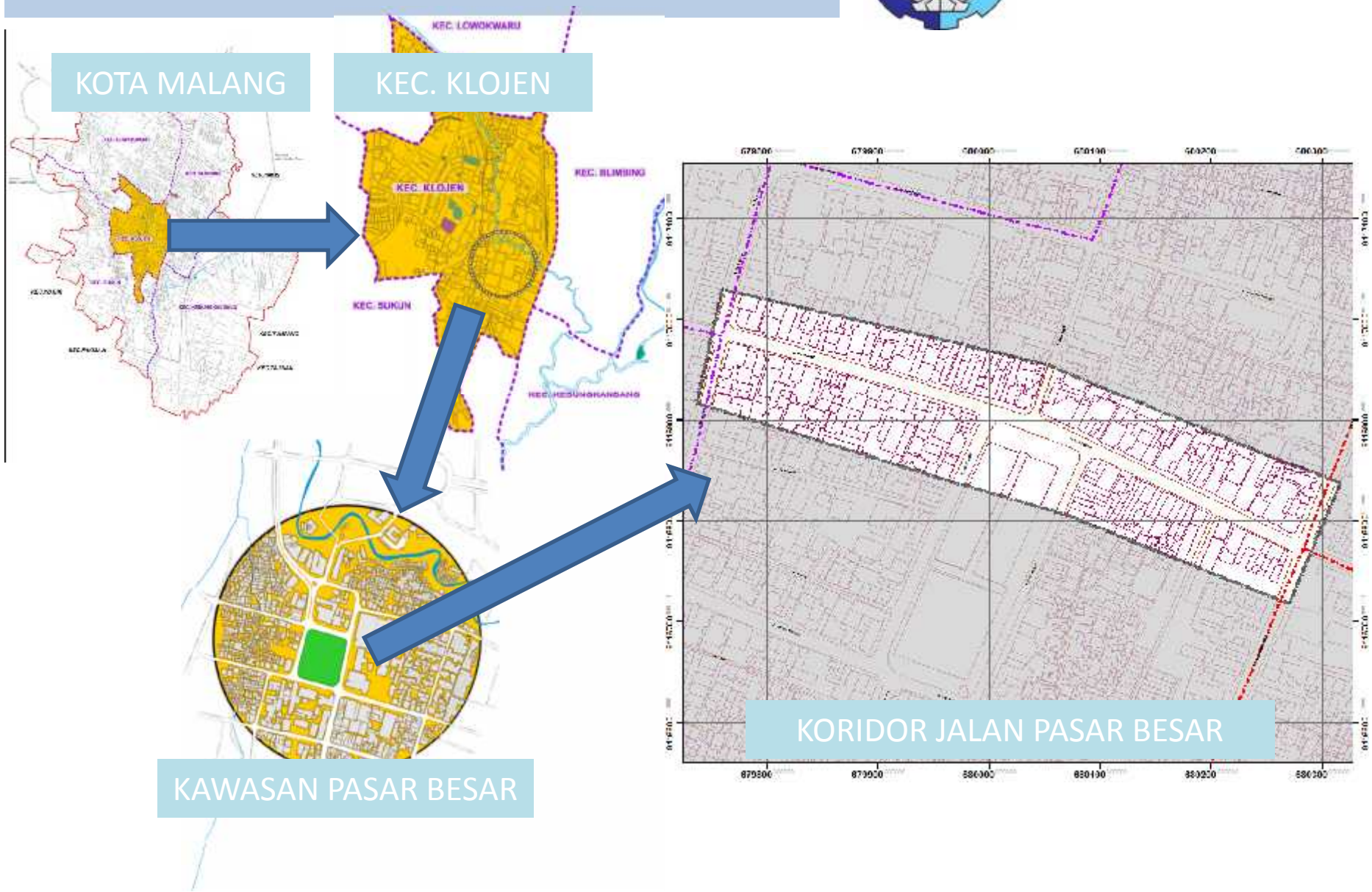

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sctor Informal
Soedarsono (1985), Sathuraman
(1991) Dan Hidayat (1996)
sector informal merupaka kegiatan usaha kecil yang berkembang karena pertumbuhan kesempatan kerja di sektor formal tidak secepat laju pertumbuhan pencari kerja.

Pengertian PKL
Kuntro dalam Purnama (2003), Sari, dalam Rosita
(2006) Dll.
pedagang kaki lima yang memiliki usaha kecil yang melayani kebutuhan barang/makanan/jasa tanpa memiliki keahlian khusus dan modal yang tinggi serta menggunakan ruang public sebagai lokasi berjualan.

Karaktersitik PKL
Rustianingsih
(2004),
1. Fungsi Kegiatan
2. Tingkat pendidikan
3. Jenis Dagangan
4. Lamanya Berprofesi
5. Tingkat Pendapatan
6. Kebutuhan Ruang
7. Model Yg diinginkan
8. Interaksi

Aspek Fisik	Jenis Branag yang diperdagangkan	➢ Jenis Barang
	Alat Peraga	➢ Sarana berdagang yang digunakan
Aspek Ekonomi	Latar Belakang Ekonomi	➢ Modal usaha
		➢ Tingkat Pendapatan
Aspek Sosial	Usia pedagang	➢ Usia
	Asal Daerah	➢ Asal Daerah
	Latar Belakang Pendidikan	➢ Tingkat pendidikan
Aspek Kegiatan	Kebutuhan Ruang	➢ Luas Lapak
		➢ Status Lapak
	Pedagang yang menetap dan berpindah-pindah	➢ Jam Operasional Berdagang
		➢ Sifat berdagang
		➢ Fungsi Berdagang

TINJAUAN PUSTAKA

PERMASALAHAN dan PENGELOLAAN PKL

KONSEP PENATAAN PKL Budiono dalam Fahri (2008) dan Sutrisno, Budi. Dkk 2007

STUDI KASUS (KOTA MALANG dan JAKARTA SELATAN)

Aspek	Indikator	Variabel
Aspek Psikologis	Adanya Penertiban	➢ Suasana Psikologis
Aspek Hukum	Sanksi	➢ Isentif dan disisentif
Aspek Lingkungan	Kualitas Lingkungan	➢ Kebersihan Lokasi PKl
Aspek Ketertiban	Tingkat Kemacetan	➢ Tingkat Kemacetan
	Ssanksi terhadap yang melanggar	➢ Isentif dan Disisentif
Aspek Kebijakan	Perijinan	➢ Perijinan
Aspek Sosial	Penyuluhan/Sosialisasi	➢ Penyuluhan tentang sadar hukum
		➢ Penyuluhan tentang waktu Berdagang
	Komuniasi	➢ Intraksi antara Pemerintah dengan PKL
	Pemberdayaan	➢ Jaminan Perlindungan
		➢ Pembinaan PKL
		➢ Pengaturan Usaha
		➢ Kerjasama antara PKL dan pemerintah

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan RASIONALISTIK dengan jenis penelitian KUALITATIF bersifat EKSPLORATIF dengan model peneletian STUDI KASUS

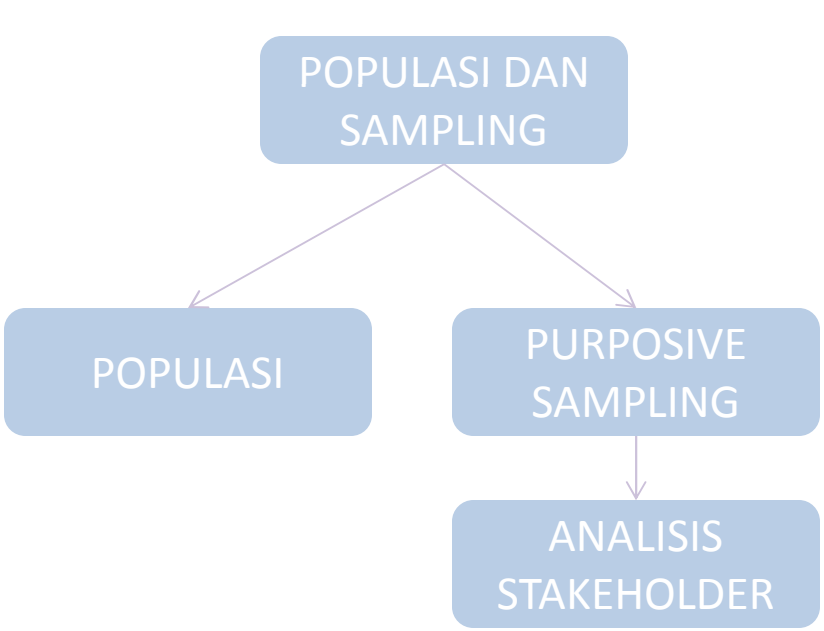

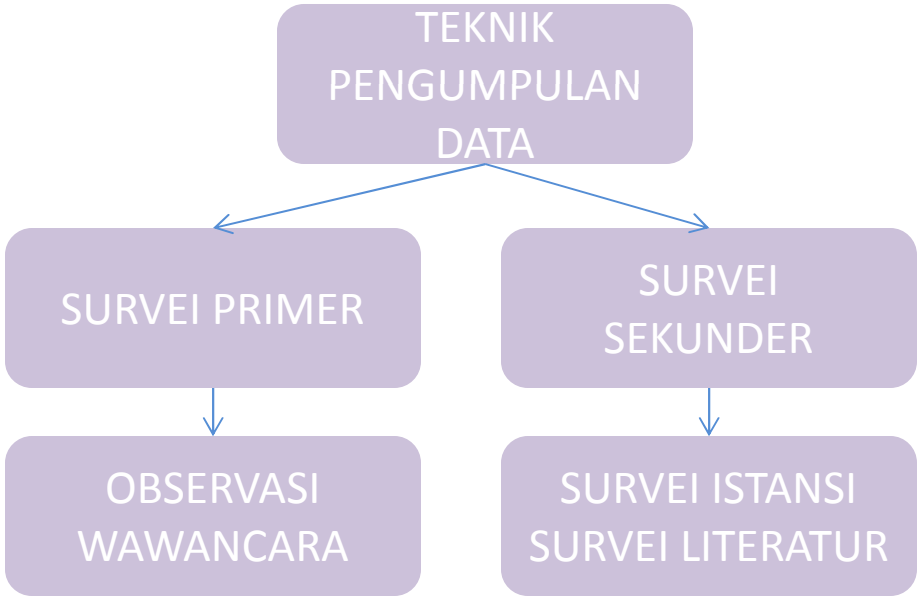

METODE PENELITIAN

Sasaran	Aspek	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
Mengidentifikasi Karakteristik PKL dan Mentiplogikan Berdasarkan Jenis Barang Dagangan	Aspek Fisik	Menjual barang dengan harga yang murah	➢ Jenis Barang	Jenis komoditi barang yang diperdagnagkan oleh PKL (Makanan/Jasa/dll)
		Alat peraga	➢ Sarana berdagang yang digunakan	Media/alat/tempat yang digunakan berdagang oleh PKL (Gerobak/Kios/Tikar/dll)
	Aspek Ekonomi	Latar Belakang Ekonomi	➢ Modal usaha	Sumber keuangan/materi yang diperoleh PKL dalam menjalankkan kegiatan usahanya (Pribadi/Bantuan/dll)
			➢ Tingkat Pendapatan	Banyakanya rupiah yang didapatkan dalam sebulan selama kegiatan berdagang berlangsung (dalam satuan rupiah/Rp)
	Aspek Sosial	Usia pedagang	➢ Usia	Usia PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya (dalam satuan angka)
		Asal Daerah	➢ Asal Daerah	Latar belakang daerah asal PKL yang menjalankan kegiatan usahanya di lokasi penelitian. (Nama Daerah/Kota/Kabupaten)
	Aspek Kegiatan	**Kebutuhan Ruang**	➢ **Luas Lapak**	**Ukuran ruang yang dibutuhkan untuk menampung barang dagangan PKL dalam menjalankan kegiatan berdagang. (dalam satuan Meter)**
			➢ Status Lapak	Status kepemilikan tempat berdagang (usaha) PKL (Milik sendiri/Sewa/dll)
		Pedagang yang menetap dan berpindah-pindah	➢ Jam Operasional Berdagang	Waktu kegiatan berdagang PKL (pagi/siang/sore/malam/dll)
			➢ Sifat berdagang	Cara yang digunakan PKL unutuk menjual barang dagangan
			➢ Fungsi Berdagang	Fungsi kegiatan berdagang PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya.
	Aspek Psikologis	Adanya Penertiban	➢ Suasana Psikologis	Keadaan psikologis PKL selama berjualan di fasilitas umum. (Tidak Tenang/Tenang/dll)

METODE PENELITIAN

Sasaran	Aspek	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL	**Aspek Lingkungan**	**Kualitas Lingkungan**	➢ **Kebersihan Lokasi PKl**	**Kondisi lingkungan yang bebas dari sampah dan genangan air**
	Aspek Ketertiban	Tingkat Kemacetan	➢ Tingkat Kemacetan	Dampak lalu lintas yang diakibatkan dari adanya PKL
		Ssanksi	➢ Isentif dan Disisentif	Penghargaan atau sanksi bagi pedagang yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan
	Aspek Kebijakan	Perijinan	➢ Perijinan	Perizinan lokasi bagi PKL yang akan menjalankan kativitasnya di lokasi tersebut (dizinkan/tidak dizinkan)
				Perizinan kegitan usaha bagi PKL yang akan menjalankan kativitasnya di lokasi tersebut (dizinkan/tidak dizinkan)
				Jenis atau macam alat berdagang penjual yang dijinkan unutk berjualan
				Waktu kegiatan berdagang PKL yang diperbolehkan dan dilarang untuk berjualan (pagi/siang/sore/malam/dll)
				Perizinan Luas Kawasan bagi PKL yang akan menjalankan kativitasnya di lokasi tersebut (dizinkan/tidak dizinkan dalam satuan meter)
				Perizinan bagi PKL terkait jarak antara pedagang yang satu dnegan yang lain yang akan menjalankan kativitasnya di lokasi tersebut (dizinkan/tidak dizinkan dalam satuan meter)
	Aspek Sosial	Penyuluhan/ Sosialisasi	➢ Penyuluhan tentang sadar hukum	Ada atau tidaknya penyuluhan mengenai sadar hukum (Hukum/dll)
			➢ Penyuluhan tentang waktu Berdagang	Ada atau tidaknya penyuluhan mengenai waktu (Hukum/dll)
		Komuniasi Pemberdayaan	➢ Intraksi antara Pemerintah dengan PKL	Ada atau tidaknya interaksi antara PKL dan Pemerintah dalam menjalankan akktivitasnya (Hukum/dll)
			➢ Jaminan Perlindungan	Bentuk perlindungan bagi kegiatan PKL dalam menjalankan akktivitasnya (Hukum/dll)
			➢ Pembinaan PKL	Bentuk program pemerintah bagi kegiatan PKL dalam menjalankan akktivitasnya

METODE ANALISIS

TRANSECT MAP dan DESKRIPSI KUANTITATIF

Mengidentifikasi karakteristik pedagang kaki lima koridor Jalan Pasar Besar Malang.

Karakteristik PKL dan Pengelompokan berdasarkan jenis dagangan

Survei Primer dengan wawancara

CONTENT ANALISIS

Menganalisa factor-faktor yang berpengaruh dalam penataan kegiatan pedagang kaki lima jalan

Faktor yang berpengaruh dalam penataan

Survei Primer dengan wawancara

TRIANGULASI

Merumuskan arahan penataan pedagang kaki lima pada jalan pasar besar kota malang

Arahan Penataan PKL

Sasaran 1 dan 2 serta kebijakan dan teori dan Surveiy Primer

HASIL

TUJUAN

METODE ANALISIS

STAKEHOLDERS

Pemerintah

- Kepala Bidang Penertiban dan Pengendalian PKL Dinas Pasar
- Kepala Bidang Tata Kota Bappeda Kota Malang
- Kepala Seksi Trantib Satpol PP Kota Malang
- Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Kelompok Masyarakat

Akademisi Ahli Tata Ruang
Tokoh Masyarakat
Paguyuban PKL Pasar Besar

GAMBARAN UMUM

KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahrian

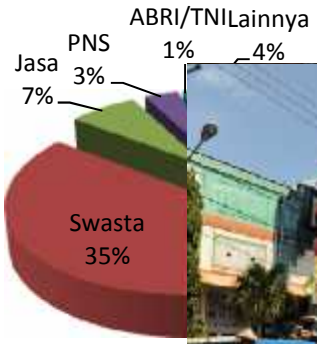

KONDISI PKL

Sebelah Utara	: Jl. KH. Agus Salim dan Jl. KH. Achmad Dahlan
Sebelah Timur	: Jl. Gatot Subroto, Jl. Zainal Jakse dan Jl. Laksmana Martadinata
Sebelah Barat	: Jl. SW. Pranoto, Jl. Sutan Sahir dan Jl. Ade Irma Suryani
Sebelah Selatan	: Jl. Wiro Margo

KARAKTERISTIK PKL

Proses Tahapan 1

Identifikasi Karakteristik Pedagang Kaki Lima Pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang

→

Variabel yang didapat berdasarkan sintesa tinjauan pustaka tahapan 1:

1. Jenis Barang Dagangan
2. Jenis Sarana Berdagang
3. Tingkat Pendidikan
4. Tingkat Pendapatan
5. Modal Usaha
6. Status Lapak
7. Luas Lapak
8. Asal Daerah
9. Jam Operasional
10. Fungsi Berdagang
11. Sifat Berdagang
12. Suasana Psikologis

TRANSECT MAP – DESKRIPTIF STATISTIK

KARAKTERISTIK PKL

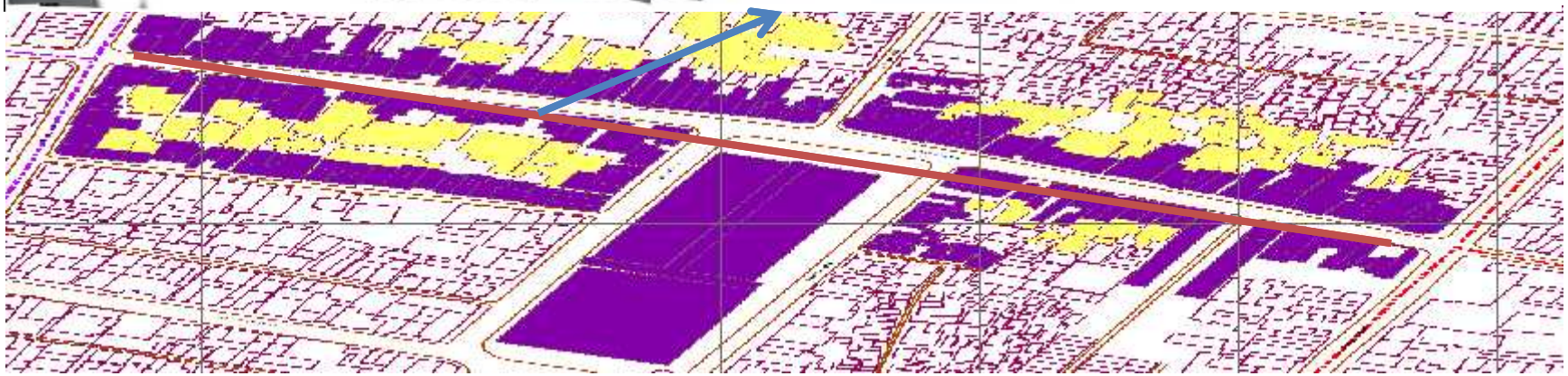

KARAKTERISTIK PKL

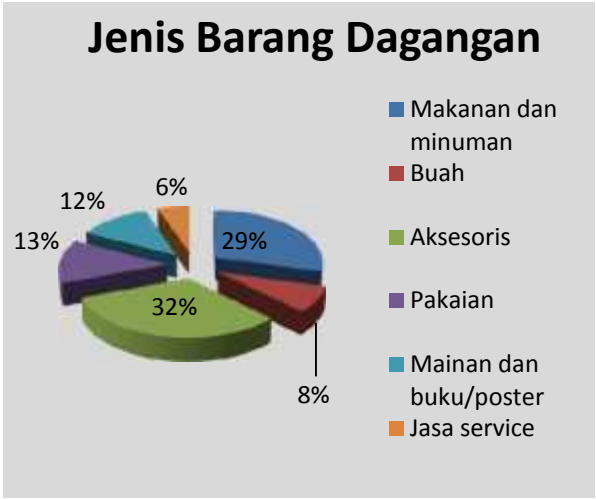

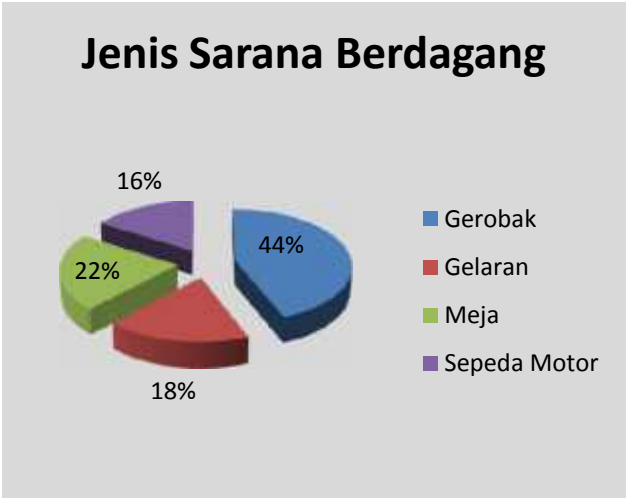

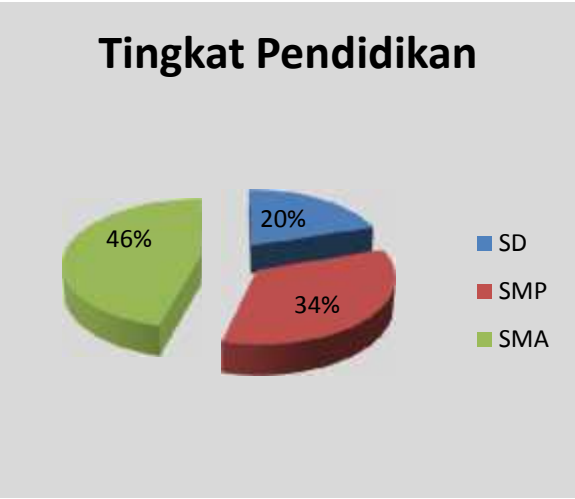

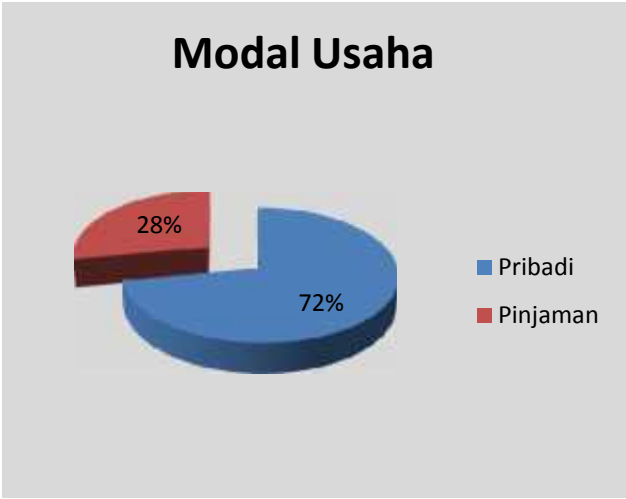

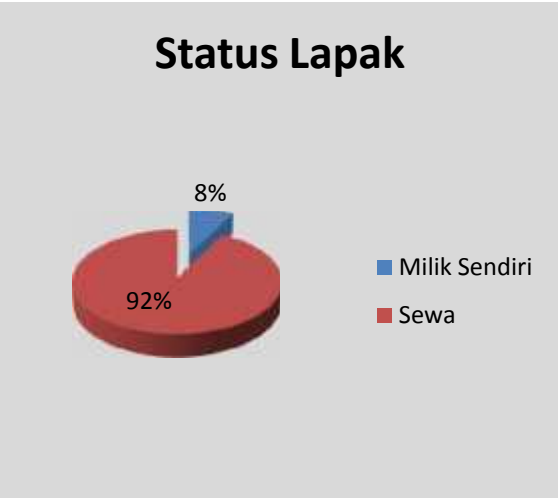

KARAKTERISTIK PKL

Luas Lapak

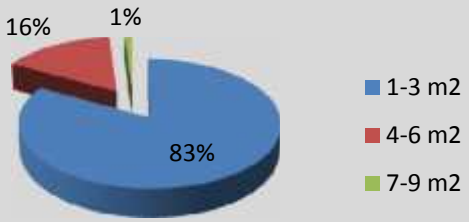

Asal Daerah

Suasana Psikologis

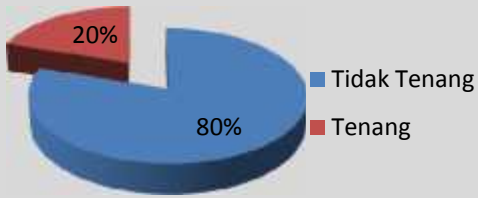

Sifat Berdagang

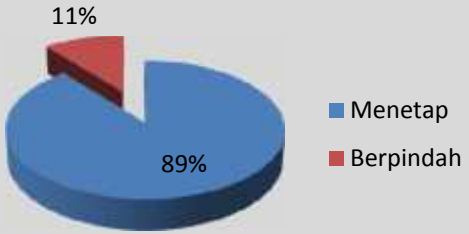

Fungsi Berdagang

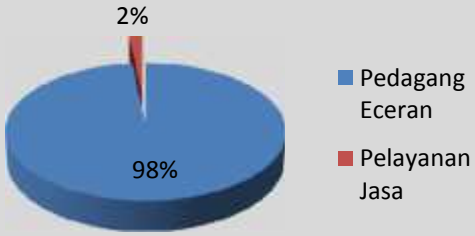

Jam Operasional

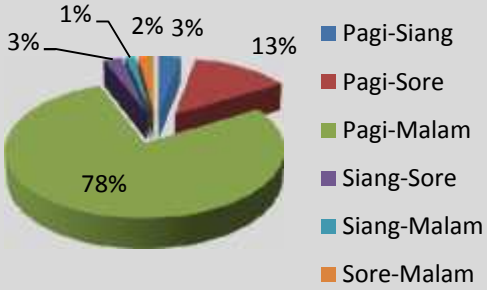

PETA PERSEBARAN PKL

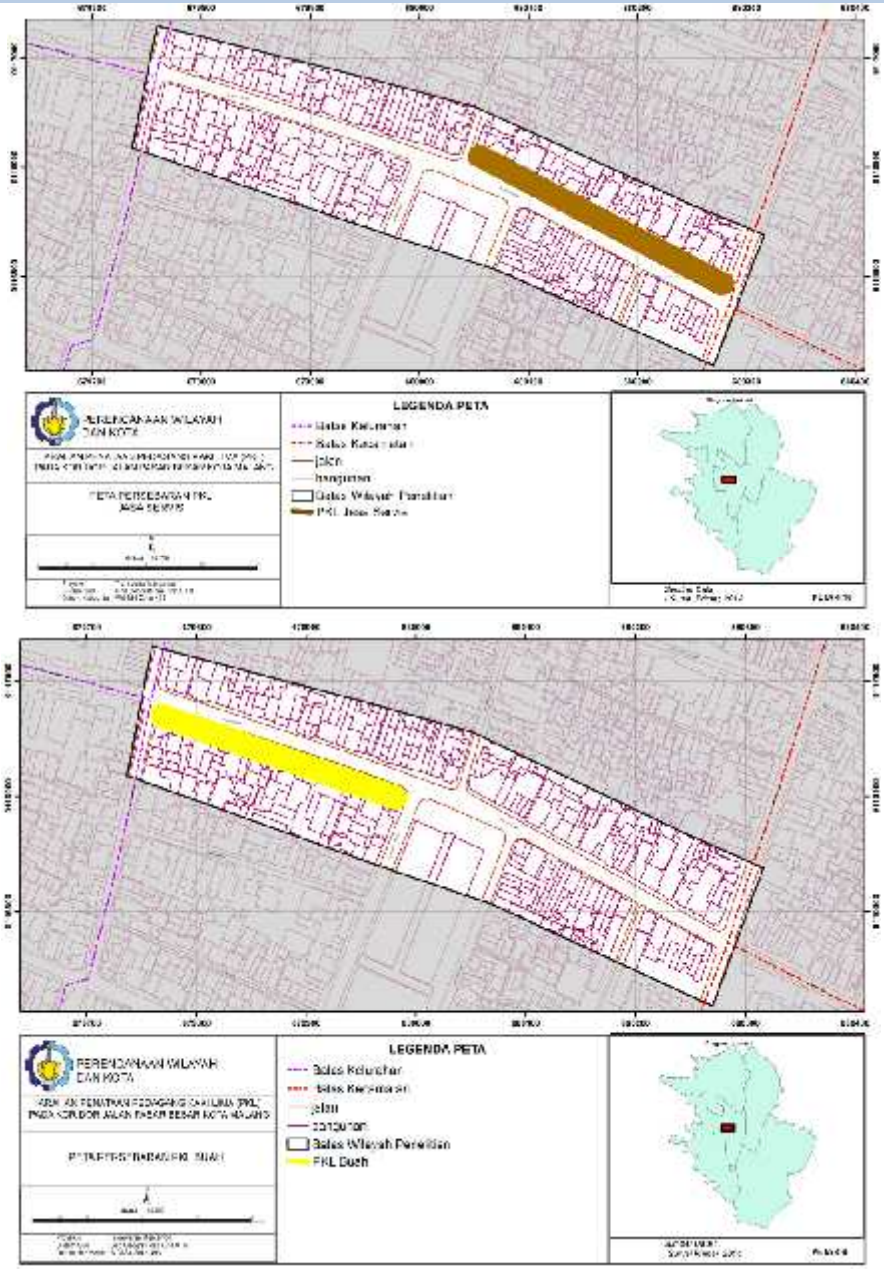

PETA PERSEBARAN PKL

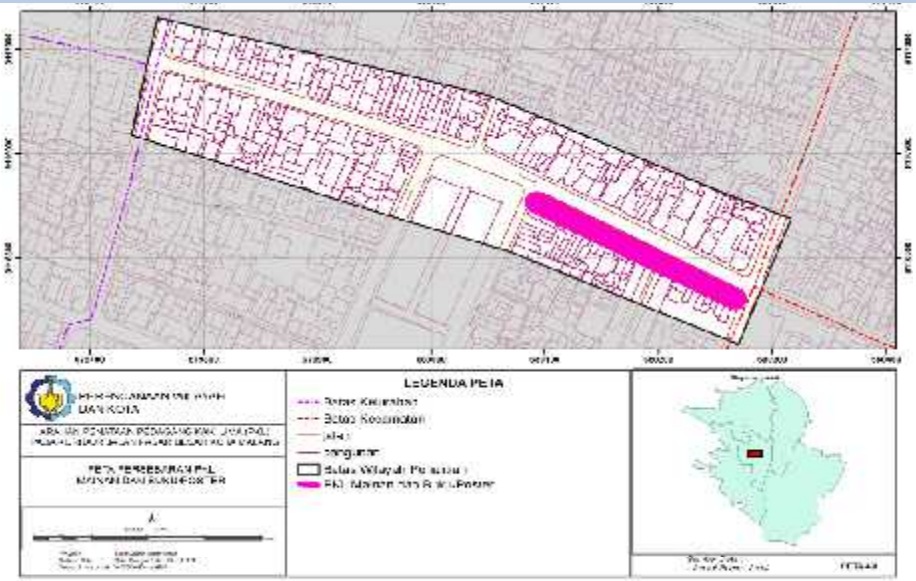

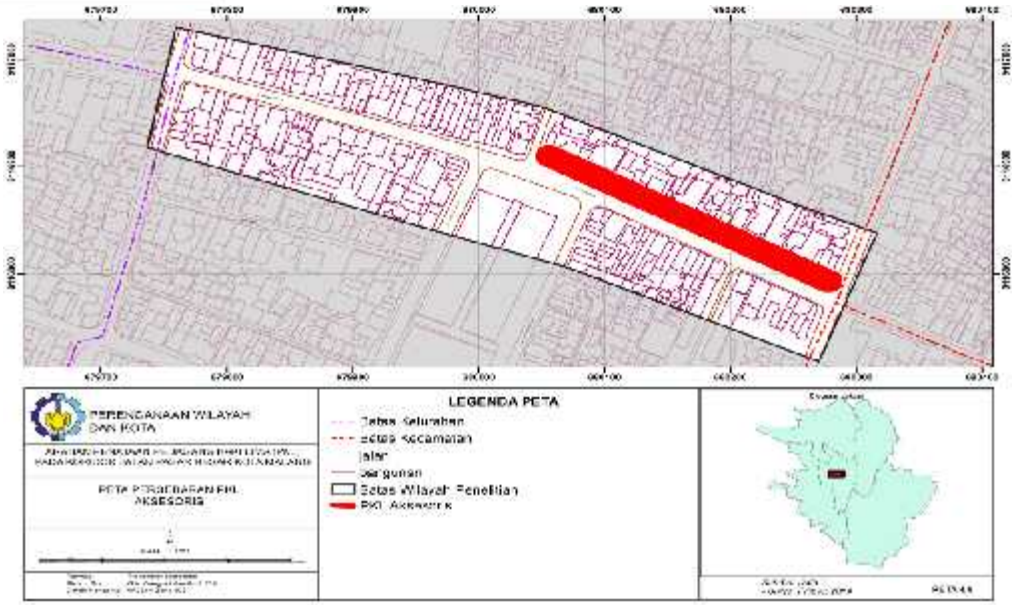

KARAKTERISTIK PKL

No.	Variabel	Karekteristik I (Makanan dan Minuman)	Karakteristik II (Buah)	Karakteristik III (Pakaian)	Karakteristik IV (Kebutuhan Tersier)
1.	**Jenis Sarana Berdagang**	Pedagang kaki lima (PKL) makanan dan minuman menggunakan gerobak dorong sebagai sarana berdagang dalam melakukan aktivitas berdagang.	Pedagang kaki lima (PKL) buah menggunakan gerobak dorong dan sepeda motor sebagai sarana berdagang dalam melakukan aktivitas berdagang.	Pedagang kaki lima (PKL) pakaian menggunakan meja, gelaran dan gantungan sebagai sarana berdagang dalam melakukan aktivitas berdagang	Pedagang kaki lima (PKL) kebutuhan tersier menggunakan meja, gelaran dan gerobak sebagai sarana berdagang dalam melakukan aktivitas berdagang.
2.	**Jenis pedagang menurut sifat**	Mayoritas merupakan pedagang yang menetap pada sekitar depan Pasar Besar *(Mall Matahari)*.	Mayoritas merupakan pedagang yang menetap pada Koridor Jalan Pasar Besar Segmen Selatan dengan menempati trotoar dan bahu jalan pada sisi timur.	Mayoritas merupakan pedagang yang menetap pada Koridor Jalan Pasar Besar Segmen Selatan dengan menemptai trotoar dan dinding toko pada sisi timur jalan	Mayoritas merupakan pedagang yang menetap pada Koridor Jalan Pasar Besar Segmen Utara dengan menempati trotoar pada satu sisi barat jalan.
3.	**Tingkat Pendapatan**	Pedagang kaki lima makanan dan minuman memiliki profit atau tingkat pendapatan berkisar Rp. 1.000.000 hingga Rp. 1.500.000. tingkat pendapat ini dipengaruhi dari jenis dan harga yang dijualnya.	Pedagang kaki lima buah memiliki profit atau tingkat pendapatan > Rp. 1.500.000. tingkat pendapat ini dipengaruhi dari jenis dan hargayang dijualnya.	Pedagang kaki lima pakaian memiliki profit atau tingkat pendapatan Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000. tingkat pendapat ini dipengaruhi dari jenis dan harga yang dijualnya.	Pedagang kaki lima kebutuhan tersier memiliki profit atau tingkat pendapatan Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000. tingkat pendapat ini dipengaruhi dari jenis dan harga yang dijualnya.
4.	**Luas Lapak**	Luas lapak pedagang kaki lima makanan dan minuman dalam melakukan aktivitas berdagang berkisar 3 m^2 - 7 m^2	Luas lapak pedagang kaki lima buah dalam melakukan aktivitas berdagang berkisar 2 m^2 - 4 m^2	Luas lapak pedagang kaki lima pakaian dalam melakukan aktivitas berdagang berkisar 1 m^2 - 3 m^2	Luas lapak pedagang kaki lima makanan dan minuman dalam melakukan aktivitas berdagang berkisar 1 m^2 -2 m^2 -
5.	**Jam Operasional**	Mayoritas Pedagang kaki lima makanan dan minuman berdagang pada siang hingga sore hari	Mayoritas Pedagang kaki lima buah berdagang pada pagi hingga sore hari	Mayoritas Pedagang kaki lima pakaian berdagang pada pagi hingga sore hari	Mayoritas Pedagang kaki lima kebutuhan tersier berdagang pada siang hingga sore hari

PKL MAKANAN DAN MINUMAN
PKL BUAH
PKL TERSIER
PKL PAKAIAN

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN

Proses Tahapan 2

Faktor-Faktor yang Berepengaruh dalam Penataan Pedagang Kaki Lima pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang

→

Variabel yang didapat berdasarkan sintesa tinjauan pustaka

CONTENT ANALISIS

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN PKL

Hasil Responden 1

Kelompok Stakeholder	Pemerintahan (Government)
Asal Instansi/Lembaga	Dinas Pasar Kota Malang
Nama Narasumber	Bambang Sugihartono, SE,. Msi
Jabatan	Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kode Variabel	Variabel Penataan PKl	Indikasi Berpengaruh (An)	Indikasi Tidak Berpengaruh (Bn)
T.1	Kebersihan Lokasi PKL	3	-
T.2	Tingkat Kemacetan	5	-
T.3	Isentif Dan Disentif	4	-
T.4	Perijinan	2	-
T.5	Penyuluhan Tentang Sadar Hukum	2	-
T.6	Penyuluhan Waktu Berdagang	3	-
T.7	Interaksi Pemerintah dengan PKL	3	-
T.8	Jaminan Perlindungan	2	-
T.9	Pembinaan PKL	9	-
T.10	Pengaturan Usaha	2	-
T.11	Kerjasama antara PKL dengan Pemerintah	3	-
Variabel Tambahan			
T.12	Fasilitas Umum	-	
T.13	Modal Usaha	-	
Modus Variabel Penataan PKL		9 (Pembinaan)	-
Minimun Iterasi		2	-
Rata-Rata Iterasi			-

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN PKL

Hasil Responden 2

Kelompok Stakeholder	Pemerintahan (Government)
Asal Instansi/Lembaga	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
Nama Narasumber	Anis Januar, ST,. MT.
Jabatan	Kepala Bidang Tata Kota

Kode Variabel	Variabel Penataan PKl	Indikasi Berpengaruh (An)	Indikasi Tidak Berpengaruh (Bn)
T.1	Kebersihan Lokasi PKL	8	-
T.2	Tingkat Kemacetan	5	-
T.3	Isentif dan Disentif	3	-
T.4	Perijinan	4	-
T.5	Penyuluhan Tentang Sadar Hukum	3	-
T.6	Penyuluhan Waktu Berdagang	5	-
T.7	Interaksi Pemerintah dengan PKL	3	-
T.8	Jaminan Perlindungan	2	-
T.9	Pembinaan PKL	3	-
T.10	Pengaturan Usaha	4	-
T.11	Kerjasama antara PKL dengan Pemerintah	2	-
Variabel Tambahan			
T.12	Fasilitas Umum		
T.13	Modal Usaha		
Modul Variabel Penataan PKL		8 (Kebersihan Lokasi)	-
Minimun Iterasi		2	-
Rata-Rata Iterasi			-

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN PKL

Hasil Responden 3

Kelompok Stakeholder	Pemerintahan (Government)
Asal Instansi/Lembaga	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
Nama Narasumber	Drs. Agung Hariadi
Jabatan	Kepala Seksi Trantibmas

Kode Variabel	Variabel Penataan PKl	Indikasi Berpengaruh (An)	Indikasi Tidak Berpengaruh (Bn)
T.1	Kebersihan Lokasi PKL	3	-
T.2	Tingkat Kemacetan	4	-
T.3	Isentif dan Disentif	3	-
T.4	Perijinan	-	4
T.5	Penyuluhan Tentang Sadar Hukum	3	-
T.6	Penyuluhan Waktu Berdagang	2	-
T.7	Interaksi Pemerintah dengan PKL	4	-
T.8	Jaminan Perlindungan	-	3
T.9	Pembinaan PKL	5	-
T.10	Pengaturan Usaha	4	-
T.11	Kerjasama antara PKL dengan Pemerintah	3	-
Variabel Tambahan			
T.12	Fasilitas Umum		
T.13	Modal Usaha		
Modul Variabel Penataan PKL		5 (Pembinaan)	4 (Perijinan)
Minimun Iterasi		2	3
Rata-Rata Iterasi			

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN PKL

Hasil Responden 4

Kode Variabel	Variabel Penataan PKl	Indikasi Berpengaruh (An)	Indikasi Tidak Berpengaruh (Bn)
T.1	Kebersihan Lokasi PKL	6	-
T.2	Tingkat Kemacetan	5	-
T.3	Isentif dan Disentif	6	-
T.4	Perijinan	3	-
T.5	Penyuluhan Tentang Sadar Hukum	3	-
T.6	Penyuluhan Waktu Berdagang	3	-
T.7	Interaksi Pemerintah dengan PKL	4	-
T.8	Jaminan Perlindungan	3	-
T.9	Pembinaan PKL	4	-
T.10	Pengaturan Usaha	4	-
T.11	Kerjasama antara PKL dengan Pemerintah	4	-
Variabel Tambahan			
T.12	Fasilitas Penunjang	3	
T.13	Modal Usaha	-	
Modul Variabel Penataan PKL		6 (Kebersihan Lokasi dan isentif dan disentif)	-
Minimun Iterasi		3	-
Rata-Rata Iterasi			-

Kelompok Stakeholder	Pemerintahan (Government)
Asal Instansi/Lembaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama Narasumber	Dra. Ida Mariani
Jabatan	Kepala Bidang Perdagangan

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN PKL

Hasil Responden 5

Kelompok Stakeholder	Civil Society (kelompok masyarakat)
Asal Instansi/Lembaga	Paguyuban PKL Pasar Besar Kota Mlang
Nama Narasumber	Heri
Jabatan	Ketua Paguyuban

Kode Variabel	Variabel Penataan PKl	Indikasi Berpengaruh (An)	Indikasi Tidak Berpengaruh (Bn)
T.1	Kebersihan Lokasi PKL	2	-
T.2	Tingkat Kemacetan	2	-
T.3	Isentif dan Disentif	4	-
T.4	Perijinan	7	-
T.5	Penyuluhan Tentang Sadar Hukum	2	-
T.6	Penyuluhan Waktu Berdagang	-	5
T.7	Interaksi Pemerintah dengan PKL	4	-
T.8	Jaminan Perlindungan	3	-
T.9	Pembinaan PKL	6	-
T.10	Pengaturan Usaha	-	3
T.11	Kerjasama antara PKL dengan Pemerintah	4	-
Variabel Tambahan			
T.12	Fasilitas Penunjnag	5	-
T.13	Modal Usaha	5	-
Modul Variabel Penataan PKL		7 (Perijinan)	-
Minimun Iterasi		2	3
Rata-Rata Iterasi			-
Jumlah Variabel Penataan		11	3

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN PKL

Hasil Responden 6

Kelompok Stakeholder	*Civil Society*
Asal Instansi/Lembaga	Akademisi
Nama Narasumber	Ibnu Sasongko
Jabatan	Kajur/Dosen Tata Kota Institut Teknologi Nasional Kota Malang

Kode Variabel	Variabel Penataan PKl	Indikasi Berpengaruh (An)	Indikasi Tidak Berpengaruh (Bn)
T.1	Kebersihan Lokasi PKL	-	2
T.2	Tingkat Kemacetan	1	-
T.3	Isentif Dan Disentif	-	2
T.4	Perijinan	3	-
T.5	Penyuluhan Tentang Sadar Hukum	2	-
T.6	Penyuluhan Waktu Berdagang	2	-
T.7	Interaksi Pemerintah dengan PKL	2	-
T.8	Jaminan Perlindungan	2	-
T.9	Pembinaan PKL	2	-
T.10	Pengaturan Usaha	1	-
T.11	Kerjasama antara PKL dengan Pemerintah	1	-
Variabel Tambahan			
T.12	Fasilitas Penunjang	4	
T.13	Modal Usaha	-	
Modul Variabel Penataan PKL		4 (Fasilitas Penunjang)	2 (Kebersihan lokasi PKL dan Isentif dan disentif)
Minimun Iterasi		1	2
Rata-Rata Iterasi			
Jumlah Variabel Penataan		11	2

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN PKL

Hasil Responden 7

Kelompok Stakeholder	Masyarakat (*Civil Society*)
Asal Instansi/Lembaga	Tokoh Masyrakat
Nama Narasumber	Wahyono Prayogo SE.
Jabatan	Ketua RW 08

Kode Variabel	Variabel Penataan PKl	Indikasi Berpengaruh (An)	Indikasi Tidak Berpengaruh (Bn)
T.1	Kebersihan Lokasi PKL	5	-
T.2	Tingkat Kemacetan	3	-
T.3	Isentif dan Disentif	5	-
T.4	Perijinan	3	-
T.5	Penyuluhan Tentang Sadar Hukum	2	-
T.6	Penyuluhan Waktu Berdagang	3	-
T.7	Interaksi Pemerintah dengan PKL	3	-
T.8	Jaminan Perlindungan	3	-
T.9	Pembinaan PKL	3	-
T.10	Pengaturan Usaha	5	-
T.11	Kerjasama antara PKL dengan Pemerintah	3	-
Variabel Tambahan			
T.12	Fasilitas Umum Penunjang	-	
T.13	Modal Usaha	-	
Modus Variabel Penataan PKL		5 (Kebersihan Lokasi PKl, Isentif dan disentif dan penagturan usaha)	-
Minimun Iterasi		2	-
Rata-Rata Iterasi			-
Jumlah Variabel Kerentanan		13	-

MATRIKS KOMBINASI STAKEHOLDER

Variabel	Kelompok stakeholder							Kesimpulan
	Goverment				Civil Society			
	G1	G2	G3	G4	C1	C2	C3	
Kebersihan Lokasi PKL	**3**	**8**	**3**	**6**	**2**	**2**	**5**	Berdasarkan kombinasi hasil, diketahui seluruh stakeholder menyepakati bahwa variable kebersihan lokasi berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima yang berada di wilayah penelitian, dengan alas an bahwa kebersihan merupakan salah satu bentuk keindahan kota terlebih lagi keberadaan PKL saat ini sangat memprihatinkan. Dengan adanya kebersihan ini pembeli dan pedagang sama-sama di untungkan. Tidak ada namanya sampah yang berserakan, selain itu kebersihan ini juga mementingkan makanan sehat dan layak jual. Dari total keseluruhan pernyataan yang terulang sebanyak 8 kali dan seluruhnya menyatakan berpengaruh maka dapat disimpulkan bahwasannya variable ini BERPENGARUH
	B	B	B	B	B	TB	B	
Tingkat Kemacetan	**5**	**5**	**4**	5	2	1	3	Berdasarkan kombinasi hasil , diketahui seluruh stakeholder menyepakati bahwa variable tingkat kemacetan berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima yang berada di wilayah penelitian, dengan alasan bahwa tingkat kemacetan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diakibatkan oleh PKL yang banyak berdagang di bahu dan trotoar jalan yang semestinya tidak diperbolehkan karena dapat mengurangi lebar ruas jalan dan banyak kendaraan pembeli yang berhenti tepat di depan PKL untuk berbelanja sehingga menimbukan kemacetan. Dari total keseluruhan pernyataan yang terulang sebanyak 5 kali dan seluruhnya menyatakan berpengaruh maka dapat disimpulkan bahwasannya variable ini **BERPENGARUH**
	B	B	B	B	B	B	B	

MATRIKS KOMBINASI STAKEHOLDER

Variabel	Kelompok stakeholder							Kesimpulan
	Goverment				Civil Society			
	G1	G2	G3	G4	C1	C2	C3	
Isentif dan Disentif	**4**	**3**	**3**	6	4	2	5	Berdasarkan kombinasi hasil , diketahui seluruh stakeholder menyepakati bahwa variable isentif dan disisentif berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima yang berada di wilayah penelitian, dengan alasan bahwa dengan adanya isentif dan didisentif ini kita dapat menkean jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang dan juga kita dapat mengatur keberdaan pedagang dengan pemeberian peraturan dan sanksi dengan jelas.. Dari total keseluruhan pernyataan yang terulang sebanyak 6 kali dan seluruhnya menyatakan berpengaruh maka dapat disimpulkan bahwasannya variable ini **SANGAT BERPENGARUH**
	B	B	B	B	B	TB	B	
Perijinan	**2**	**4**	**4**	3	6	3	3	Berdasarkan kombinasi hasil , diketahui seluruh stakeholder menyepakati bahwa variable Perijinan berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima yang berada di wilayah penelitian, dengan alasan perijinan adalah dasar hukum keberadaan PKL atas lokasi yang mereka tempati, sehingga keberadaan PKL ini dapat pertanggung jawabkan. Dari total keseluruhan pernyataan yang terulang sebanyak 6 kali dan seluruhnya menyatakan berpengaruh maka dapat disimpulkan bahwasannya variable ini SANGAT BERPENGARUH
	B	B	TB	B	B	B	B	

MATRIKS KOMBINASI STAKEHOLDER

Variabel	Kelompok stakeholder							Kesimpulan
	Goverment				Civil Society			
	G1	G2	G3	G4	C1	C2	C3	
Penyuluhan Tentang Sadar Hukum	**2**	**3**	**3**	3	2	2	2	Berdasarkan kombinasi hasil , diketahui seluruh stakeholder menyepakati bahwa variable Peryuluhan tentang sadar hukum berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima yang berada di wilayah penelitian, dengan alasan PKL sangat memerlukan penyuluhan tentang sadar hukum. Dari total keseluruhan pernyataan yang terulang sebanyak 3 kali dan seluruhnya menyatakan berpengaruh maka dapat disimpulkan bahwasannya variable ini **BERPENGARUH**
	B	B	B	B	B	B	B	
Penyuluhan Waktu Berdagang	**3**	**5**	**2**	3	5	2	3	Berdasarkan kombinasi hasil , diketahui seluruh stakeholder menyepakati bahwa variable Peryuluhan tentang waktu berdagang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima yang berada di wilayah penelitian, dengan alasan PKL sangat memerlukan penyuluhan waktu berdagang. Dari total keseluruhan pernyataan yang terulang sebanyak 5 kali dan seluruhnya menyatakan berpengaruh maka dapat disimpulkan bahwasannya variable ini **BERPENGARUH**
	B	B	B	B	TB	B	B	

MATRIKS KOMBINASI STAKEHOLDER

Variabel	Kelompok stakeholder							Kesimpulan
	Goverment				Civil Society			
	G1	G2	G3	G4	C1	C2	C3	
Interaksi Pemerintah dengan PKL	**3**	**3**	**4**	4	4	2	3	Berdasarkan kombinasi hasil , diketahui seluruh stakeholder menyepakati bahwa variable interaksi dengan pemerintah berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima yang berada di wilayah penelitian, dengan alasan interaksi pemerintah dengan PKL sangat penting dalam membuta kesepakatan.. Dari total keseluruhan pernyataan yang terulang sebanyak 4 kali dan seluruhnya menyatakan berpengaruh maka dapat disimpulkan bahwasannya variable ini **BERPENGARUH**
	B	B	B	B	B	B	B	
Jaminan Perlindungan	**2**	**2**	**3**	3	3	2	3	Berdasarkan kombinasi hasil , diketahui seluruh stakeholder menyepakati bahwa variable Jaminan perlindungan berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima yang berada di wilayah penelitian, dengan alasan jaminan perlindungan adalah dasar hukum keberadaan PKL atas lokasi yang mereka tempati, sehingga keberadaan PKL ini dapat pertanggung jawabkan. Dari total keseluruhan pernyataan yang terulang sebanyak 3 kali dan seluruhnya menyatakan berpengaruh maka dapat disimpulkan bahwasannya variable ini **BERPENGARUH**
	B	B	TB	B	B	B	B	

MATRIKS KOMBINASI STAKEHOLDER

Variabel	Kelompok stakeholder							Kesimpulan
	Goverment				Civil Society			
	G1	G2	G3	G4	C1	C2	C3	
Pembinaan PKL	**9**	**3**	**5**	4	6	2	3	Berdasarkan kombinasi hasil , diketahui seluruh stakeholder menyepakati bahwa variable Pembinaan PKL berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima yang berada di wilayah penelitian, dengan alasan Pembinaan PKL salah satu hak yang penting untuk mengntrol keberadaan PKL Dari total keseluruhan pernyataan yang terulang sebanyak 6 kali dan seluruhnya menyatakan berpengaruh maka dapat disimpulkan bahwasannya variable ini **BERPENGARUH**
	B	B	B	B	B	B	B	
Pengaturan Usaha	**2**	**4**	**4**	4	3	1	5	Berdasarkan kombinasi hasil , diketahui seluruh stakeholder menyepakati bahwa variable Pengaturan usaha berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima yang berada di wilayah penelitian, dengan alasan pengaturan usaha, diperlukan unutk menciptakan kondisi yang tepat, ketika banyak PKL yang tidak dapat diatur.. Dari total keseluruhan pernyataan yang terulang sebanyak 5 kali dan seluruhnya menyatakan berpengaruh maka dapat disimpulkan bahwasannya variable ini **BERPENGARUH**
	B	B	B	B	TB	B	B	
Kerjasama antara PKL dengan Pemerintah	**3**	**2**	**3**	4	4	1	3	Berdasarkan kombinasi hasil , diketahui seluruh stakeholder menyepakati bahwa variable kerjasama berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima yang berada di wilayah penelitian, dengan alasan kerja sama merupakan salah satu cara agar mencapai ksepakatan antara PKL dengan Pemerintah. Dari total keseluruhan pernyataan yang terulang sebanyak 4 kali dan seluruhnya menyatakan berpengaruh maka dapat disimpulkan bahwasannya variable ini **BERPENGARUH**
	B	B	B	B	TB	B	B	

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN PKL

Variabel	Kondisi eksisiting	Teori yang berkaitan	Faktor
Kebersihan Lokasi PKL	Kebersihan PKL masih dirasa kurang hal ini disebabkan kurangny kesadaran PKL dengan ditandainya banyaknya sampah yang ditimbulkan oleh PKL	Hambatan utama penataan kebersihan adalah kurangnya kesadaran kolektif para pedagang akan kebersihan, mereka cenderung mengabaikan kebersihan dan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan. Disamping itu sistem drainase lingkungan yang buruk, saluran air yang kurang memadai juga mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar lokasi PKL.	kesadaran kolektif para pedagang akan kebersihan, mereka cenderung mengabaikan kebersihan dan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan. Pada kondisi eksisiting kondisi kebersihan PKL masih sangat kurang dengan ditandai banykanya sampah padaa sudut-sudut jalan. Sehingga salah satu faktor yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima adalah **rendahnya kebersihan pada lokasi berdagang PKL.**
Tingkat Kemacetan	Keberadaan PKL yang menempati trotoar dan bahu jalan menimbulkan penyempitan lebar jalan. Hal ini mengakibatkan kemacetan pada jalan tersebut. Terlebih lagi kondisi jalan tersebut tergolong padat.	Umumnya PKL tidak resmi/liar **kurang perduli akan masalah ketertiban dan kemacetan,** justru mereka beranggapan bahwa dengan kemacetan tersebut akan menjaring konsumen untuk membeli barang dagangannya (Bappeda kota Jakarta Utara, 2007)	Umumnya PKL tidak resmi/liar kurang perduli akan masalah ketertiban dan kemacetan. Pada kondisi eksisiting keberadaan PKL ini menimbulakn kemacetan yang diakibatkan oleh PKL yang menggunakan bahu jalan sebagai lokasi berdagang terebih lagi kondisi pada jalan tersebut tergolong padat. Sehingga salah satu faktor yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima adalah **Tingginya tingkat kemacetan yang disebabkan oleh keberadaan PKL yang menggunakan bahu jalan.**

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN PKL

Variabel%	Kondisi eksisiting	Teori yang berkaitan	Faktor
Isentif Dan Disentif	Isentif dan disentif pada lokasi tersebut belum ada. Karena masih belum jelas mengenai peraturannya.	Pengendalian kegiatan dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, pemberian izin, perlakuan insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Fungsi pengendalian dan pemanfaatan ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan untuk menciptakan tertib tata ruang (Rahmi, 2004).	Pengendalian kegiatan dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, pemberian izin, perlakuan insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Fungsi pengendalian dan pemanfaatan ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan untuk menciptakan tertib tata ruang (Rahmi, 2004). Namun Isentif dan disentif pada lokasi tersebut belum ada. Karena masih belum jelas mengenai peraturannya.**Belum Terdapat isentif dan disentif terhadap keberadaan PKL**
Isentif Dan Disentif	Isentif dan disentif pada lokasi tersebut belum ada. Karena masih belum jelas mengenai peraturannya.	Pengendalian kegiatan dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, pemberian izin, perlakuan insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Fungsi pengendalian dan pemanfaatan ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan untuk menciptakan tertib tata ruang (Rahmi, 2004).	Pengendalian kegiatan dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, pemberian izin, perlakuan insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Fungsi pengendalian dan pemanfaatan ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan untuk menciptakan tertib tata ruang (Rahmi, 2004). Namun Isentif dan disentif pada lokasi tersebut belum ada. Karena masih belum jelas mengenai peraturannya.**Belum Terdapat isentif dan disentif terhadap keberadaan PKL**

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN PKL

Variabel%	Kondisi eksisiting	Teori yang berkaitan	Faktor
Perijinan	Pada Lokasi penelitian PKL belum memiliki perizinan terkait usaha berdagangnya dan dapat dikatakan pedagang tersebut tergolong ilegal walaupun lokasi tersebut diarahakan untuk pedagang kaki lima	**Pada umumnya unit usahanya tidak mempunyai ijin** (Yustika, 2000) pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pedagang/jasa yaitu melayani kebutuhan barang-barang/makanan yang di konsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas dalam melakukan usaha tersebut guna menggerakkan peralatan sederhana dan memiliki **lokasi di tempat-tempat umum (terutama diatas trotoar, sebagian badan jalan) dengan tidak mempunyai legalitas formal** (Purnama, 2003)	Yustika, 2005 berpendapat bahwa pada umunya unit usahanya tidak memiki ijin dan menurut purnama, 2003 mengatkan bahwa PKl berdagang pada tempat-tempat umum (terutama diatas trotoar, sebagian badan jalan) dengan tidak mempunyai legalitas formal. Pada kondisi eksisting pedagang kaki lima ini menggunakan fasilitas umum seperti jalan dan trotoar sebagai sarana berdagangnya. Para pedagang ini tidak memiliki izin yang pasti terhadap lokasi berdagang dan usaha mereka. Sehingga salah satu faktor yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima adalah **terdapatnya perizinan yang jelas untuk berdagang**
Penyuluhan Tentang Sadar Hukum	Sampai sejuh ini PKL belum mendapatkan penyuluhan mengenai sadar hukum baik dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Sehingga mereka tidah tahu banyak mengenai hukum yang berada pada lokasi berdagang tersebut.	Penyuluhan sadarkum sebagai pembinaan nonphisik, agar PKL dapat menjalin hubungan serasi dengan lingkungan tempat usaha dengan prinsip tidak ada yang merasa dirugikan. Penyuluhan Sadarkum sebagai pembinaan nonphisik agar PKL bertanggungjawab terhadap ketertiban kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatann lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha	Penyuluhan sadarkum sebagai pembinaan nonphisik, agar PKL dapat menjalin hubungan serasi dengan lingkungan tempat usaha dengan prinsip tidak ada yang merasa dirugikan. Pada kondisi eksisiting Sampai sejuh ini PKL belum mendapatkan penyuluhan mengenai sadar hukum baik dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Sehingga mereka tidah tahu banyak mengenai hukum yang berada pada lokasi berdagang tersebut. Sehingga salah satu faktor yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima adalah **tidak terdapatnya penyuluhan sadar hukum sehungga PKL tidak mengerti mengani hukum yang berlaku pada lokasi tersebut.**

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN

Variabel%	Kondisi eksisiting	Teori yang berkaitan	Faktor
Penyuluhan Waktu Berdagang	Sampai sejuh ini PKL belum mendapatkan penyuluhan mengenai waktu berdagang baik dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Sehingga para pedagang berdagang tanpa ada batas waktu.	Penyuluhan tentang waktu usaha, tempat usaha dan sarana usaha yang menjamin keindahan dan keamanan yang mendukung program Pemkot.	Penyuluhan tentang waktu usaha, tempat usaha dan sarana usaha yang menjamin keindahan dan keamanan yang mendukung program Pemkot. Pada kondisi eksisiting Sampai sejuh ini PKL belum mendapatkan penyuluhan mengenai waktu berdagang baik dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Sehingga para pedagang berdagang tanpa ada batas waktu. Sehingga mereka tidah tahu banyak mengenai hukum yang berada pada lokasi berdagang tersebut. Sehingga salah satu faktor yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima adalah **tidak terdapatnya penyuluhan waktu berdagang yang menyebabkan PKL berdagang tanpa ada batasan waktu.**
Interaksi Pemerintah dengan PKL	Sampai sejauh ini sedikita sekali PKl yang berinteraksi dengan pemerintah	Menurut Soerjono Soekanto (2007), interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang-perorang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun orang-perorang dengan kelompok manusia.	interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang-perorang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun orang-perorang dengan kelompok manusia. Namun Sampai sejauh ini sedikita sekali PKl yang berinteraksi dengan pemerintah Sehingga salah satu faktor yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima adalah **Rendahnya interaksi pemerintah dengan PKL terakait aktivitas berdagangnya.**

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN

Variabel%	Kondisi eksisiting	Teori yang berkaitan	Faktor
Jaminan Perlindungan	PKL belum memiliki jaminan perlindungan dikarenakan status mereka yang masih ilegal, sehingga pemerintah belum memberikan TDU dan jaminan yang pasti terhadap perlindungan PKL. Dalam melakukan aktvitasnya PKL sering mendapatkan perasaan tidak tenang	Memberdayakan usaha sektor informal PKL dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan usaha agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan PKL khususnya dan masyarakat kota umumnya.	Memberdayakan usaha sektor informal PKL dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan usaha agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan PKL khususnya dan masyarakat kota umumnya. Pada kondisi eksisting PKL belum memiliki jaminan perlindungan dikarenakan status mereka yang masih ilegal, sehingga pemerintah belum memberikan TDU dan jaminan yang pasti terhadap perlindungan PKL. Dalam melakukan aktvitasnya PKL sering mendapatkan perasaan tidak tenang Sehingga salah satu faktor yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima adalah **belum terdapatnya Jaminan perlindungan bagi PKL untuk kegiatan berdagang.**
Pembinaan PKL	Tidak adanya pembinaan oleh pemerintah dan pihak terkait hingga sejauh ini, sehingga mengakibatkan kurang terkontrolnya kondisi PKL saat ini. Keberadaan PKL semakin meluas dan tidak tertata pada lokasi tersebut	Memberdayakan usaha sektor informal PKL dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan usaha agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan PKL khususnya dan masyarakat kota umumnya.	Memberdayakan usaha sektor informal PKL dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan usaha agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan PKL khususnya dan masyarakat kota umumnya. Pada konsisi eksisting Tidak adanya pembinaan oleh pemerintah dan pihak terkait hingga sejauh ini, sehingga mengakibatkan kurang terkontrolnya kondisi PKL saat ini. Keberadaan PKL semakin meluas dan tidak tertata pada lokasi tersebut Sehingga salah satu faktor yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima adalah **belum terdapatnya Pembinaan oleh pemerintah bagi PKL untuk kegiatan berdagang.**

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN PKL

Variabel%	Kondisi eksisiting	Teori yang berkaitan	Faktor
Pengaturan Usaha	Pengaturan usaha pada PKL pada Jalan Pasar Besar Kota Malang sejauh ini belum dilakukan pengaturan usaha. Sehingga banyak PKL	Pengaturan tempat usaha PKL yang menjamin ketertiban, keamanan dan keindahan kota, serta menunjang program pemerintah menjadikan kota sebagai kota budaya, pariwisata dan olahraga.	Pengaturan tempat usaha PKL yang menjamin ketertiban, keamanan dan keindahan kota, serta menunjang program pemerintah menjadikan kota sebagai kota budaya, pariwisata dan olahraga. Pada kondisi eksisiting Pengaturan usaha pada PKL pada Jalan Pasar Besar Kota Malang sejauh ini belum dilakukan pengaturan usaha. Sehingga banyak PKL. Sehingga salah satu faktor yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima adalah **Pentinganya pengaturan usaha bagi PKL untuk ketertiban, keindahan dan keamanan kota.**
Kerjasama antara PKL dengan Pemerintah	PKL sampai sejauh ini belum pernah menjalin kerjasama dengan pemerintah terkait pemberin modal maupun bantuan yang lainnya.	Kemitraan, yaitu mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar; mendorong hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan serta persaingan usaha yang sehat	Kemitraan, yaitu mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar; mendorong hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan serta persaingan usaha yang sehat. Pada konsisi eksisting saat ini PKL sampai sejauh ini belum pernah menjalin kerjasama dengan pemerintah terkait pemberin modal maupun bantuan yang lainnya. Sehingga salah satu faktor yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima adalah **Pentinganya kerjasama bagi PKL oleh pemerintah untuk mendorong kerjasama yang saling menguntungkan.**

FAKTOR-FAKTOR PENATAAN PKL

Variabel%	Kondisi eksisiting	Teori yang berkaitan	Faktor
Pengaturan Usaha	Pengaturan usaha pada PKL pada Jalan Pasar Besar Kota Malang sejauh ini belum dilakukan pengaturan usaha. Sehingga banyak PKL	Pengaturan tempat usaha PKL yang menjamin ketertiban, keamanan dan keindahan kota, serta menunjang program pemerintah menjadikan kota sebagai kota budaya, pariwisata dan olahraga.	Pengaturan tempat usaha PKL yang menjamin ketertiban, keamanan dan keindahan kota, serta menunjang program pemerintah menjadikan kota sebagai kota budaya, pariwisata dan olahraga. Pada kondisi eksisiting Pengaturan usaha pada PKL pada Jalan Pasar Besar Kota Malang sejauh ini belum dilakukan pengaturan usaha. Sehingga banyak PKL. Sehingga salah satu faktor yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima adalah **Pentinganya pengaturan usaha bagi PKL untuk ketertiban, keindahan dan keamanan kota.**
	PKL sampai sejauh ini belum pernah menjalin kerjasama dengan pemerintah terkait pemberin modal maupun bantuan yang lainnya.	Kemitraan, yaitu mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar; mendorong hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan serta persaingan usaha yang sehat	Kemitraan, yaitu mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar; mendorong hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan serta persaingan usaha yang sehat. Pada konsisi eksisting saat ini PKL sampai sejauh ini belum pernah menjalin kerjasama dengan pemerintah terkait pemberin modal maupun bantuan yang lainnya. Sehingga salah satu faktor yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima adalah **Pentinganya kerjasama bagi PKL oleh pemerintah untuk mendorong kerjasama yang saling menguntungkan.**

ARAHAN PENATAAN PKL

Proses Tahapan 3

ARAHAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

TRIANGULASI

1. **Pentinganya pengaturan usaha bagi PKL untuk ketertiban, keindahan dan keamanan kota**
2. **Rendahnya Kebersihan Pada Lokasi berdagang PKL**
3. **Tingginya tingkat kemacetan yang disebabkan oleh keberadaan PKL yang menggunakan bahu jalan**
4. **Tidak terdapatnya perizinan yang jelas untuk berdagang**
5. **belum terdapatnya Pembinaan dan penyuluhan oleh pemerintah bagi PKL untuk kegiatan berdagang.**
6. **Pentinganya kerjasama bagi PKL oleh pemerintah untuk mendorong kerjasama yang saling menguntungkan.**
7. **Rendahnya interaksi pemerintah dengan PKL terakait aktivitas berdagangnya.**
8. **Belum Terdapat isentif dan disentif terhadap keberadaan PKL**
9. **belum terdapatnya Jaminan perlindungan bagi PKL untuk kegiatan berdagang.**
10. **Belum Terdapatnya fasilitas umum yang memadai**

ARAHAN PENATAAN PKL

1. Pentinganya pengaturan usaha bagi PKL untuk ketertiban, keindahan dan keamanan kota
2. Rendahnya Kebersihan Pada Lokasi berdagang PKL
3. Tingginya tingkat kemacetan yang disebabkan oleh keberadaan PKL yang menggunakan bahu jalan
4. Tidak terdapatnya perizinan yang jelas untuk berdagang
5. belum terdapatnya Pembinaan dan penyuluhan oleh pemerintah bagi PKL untuk kegiatan berdagang.
6. Pentinganya kerjasama bagi PKL oleh pemerintah untuk mendorong kerjasama yang saling menguntungkan.
7. Rendahnya interaksi pemerintah dengan PKL terakait aktivitas berdagangnya.
8. Belum Terdapat isentif dan disentif terhadap keberadaan PKL
9. belum terdapatnya Jaminan perlindungan bagi PKL untuk kegiatan berdagang.
10. Belum Terdapatnya fasilitas umum yang memadai

KONDISI EKSISTING

TEORI ATAU REGULASI

BEST PRATICE

DIBANDINGKAN

ARAHAN

ARAHAN PENATAAN PKL

INPUT		Merumuskan Arahan			
Faktor	Variabel	PKL Makanan dan Minuman	PKL Buah	PKL Pakaian	PKL Kebutuhan Tersier
Pentinganya pengaturan usaha bagi PKL untuk ketertiban, keindahan dan keamanan kota	Jenis Sarana Berdagang	Pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman menggunakan rombong/gerobak dan tenda yang mudah dibongkar pasang, meja dan kursi dengan bentuk dan warna yang seragam.	Pedagang kaki lima yang menjual Buah menggunakan rombong/gerobak dan tenda yang mudah dibongkar pasang, meja dan kursi dengan bentuk dan warna yang seragam.	Pedagang kaki lima yang menjual pakaian menggunakan rombong/gerobak dan meja dengan model yang sama.	Pedagang kaki lima yang menjual kebutuhan tersier menggunakan rombong/gerobak dan meja dengan model yang sama.
	Jenis pedagang menurut sifat	Pedagang kaki Lima Makanan dan Minuman diarahakan untuk berdagangg menetap di depan Pasar Besar.	Pedagang kaki Lima Makanan dan Minuman diarahakan untuk berdagang menetap pada Jalan Pasar Besar bagian Selatan dengan menggunakan satu sisi timur saja	Pedagang kaki Lima pakaian diarahakan untuk berdagang menetap pada Jalan Pasar Besar bagian Selatan dengan menggunakan satu sisi barat saja	Pedagang kaki Lima kebutuhan tersier diarahakan untuk berdagang menetap pada Jalan Pasar Besar bagian utara.
	Luas Lapak	Pedagang kaki lima makanan dan minuman yang berdagang didepan Pasar Besar hanya 3 - 4 m^2	Pedagang kaki lima buah yang berdagang didepan Pasar Besar hanya 2 - 3 m^2	Pedagang kaki lima buah yang berdagang didepan Pasar Besar hanya 1 - 3 m^2	Pedagang kaki lima kebutuhan tersier yang berdagang pada Koridor Jalan Pasar Besar segmen utara hanya 1 - 2 m^2
	Jam Operasional	1. Pedagang kaki Lima yang berdagang makanan dan minuman dapat berjualan mulai pukul 10.00 – 22.00	1. Pedagang kaki Lima yang berdagang buah dapat berjualan mulai pukul 09.00 – 17.00	Pedagang kaki Lima yang berdagang pakaian dapat berjualan mulai pukul 09.00 – 17.00	Pedagang kaki Lima yang berdagang aksesoris dapat berjualan mulai pukul 09.00 – 17.00

ARAHAN PENATAAN PKL

INPUT		KOMPERASI			Merumuskan Arahan
Faktor	**Permasalahan**	**Kondisi Eksisiting**	**Teori/Regulasi**	**Best Practice**	
Fasilitas Umum	**Parkir**	**Kondisi perpakiran menggunakan jalan raya sebgai lokasi parkir. Sehingga menjadikan jalan menjadi sempit dan pada akhirnya memicu kemacetan**	**Berdasarkan Rencana Penataan Induk Sektor informal Kota Malang Tahun Informal tahun 2013 – 2033** **Untuk parkir yang berada pada koridor Jalan Pasar Besar diarhakan untuk masuk ke lokasi *mall***	**Studi Kasus pedagang kaki lima Pasar Surya Kota Surabaya** **Untuk kendaraan parkir on-street dibeerlakukan jam khusus.**	**Parkir on-street yang berada pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota diarahkan unutuk masuk kedalam mall**
	Terminal Bayangan	**Terdapat Terminal bayangan yang berada pada koridor Jalan Pasar besar. Terminal bayangan tersebut berfungsi untuk menaikan dan menurunkan penumpang. Sehingga pada loaksi tersebut sering terjadi kemacetan karena berada pada simpang tiga**	**Berdasarkan Rencana Penataan Induk Sektor informal Kota Malang Tahun Informal tahun 2013 – 2033** **Untuk terminal bayangan dihilangkan dari simpang tiga tersbut dan dibutakan halte didepan Pasar Besar.**		**Terminal bayangang dihilangkan dan diarahakn untuk pembuatan halte didepan Pasar Besar**

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

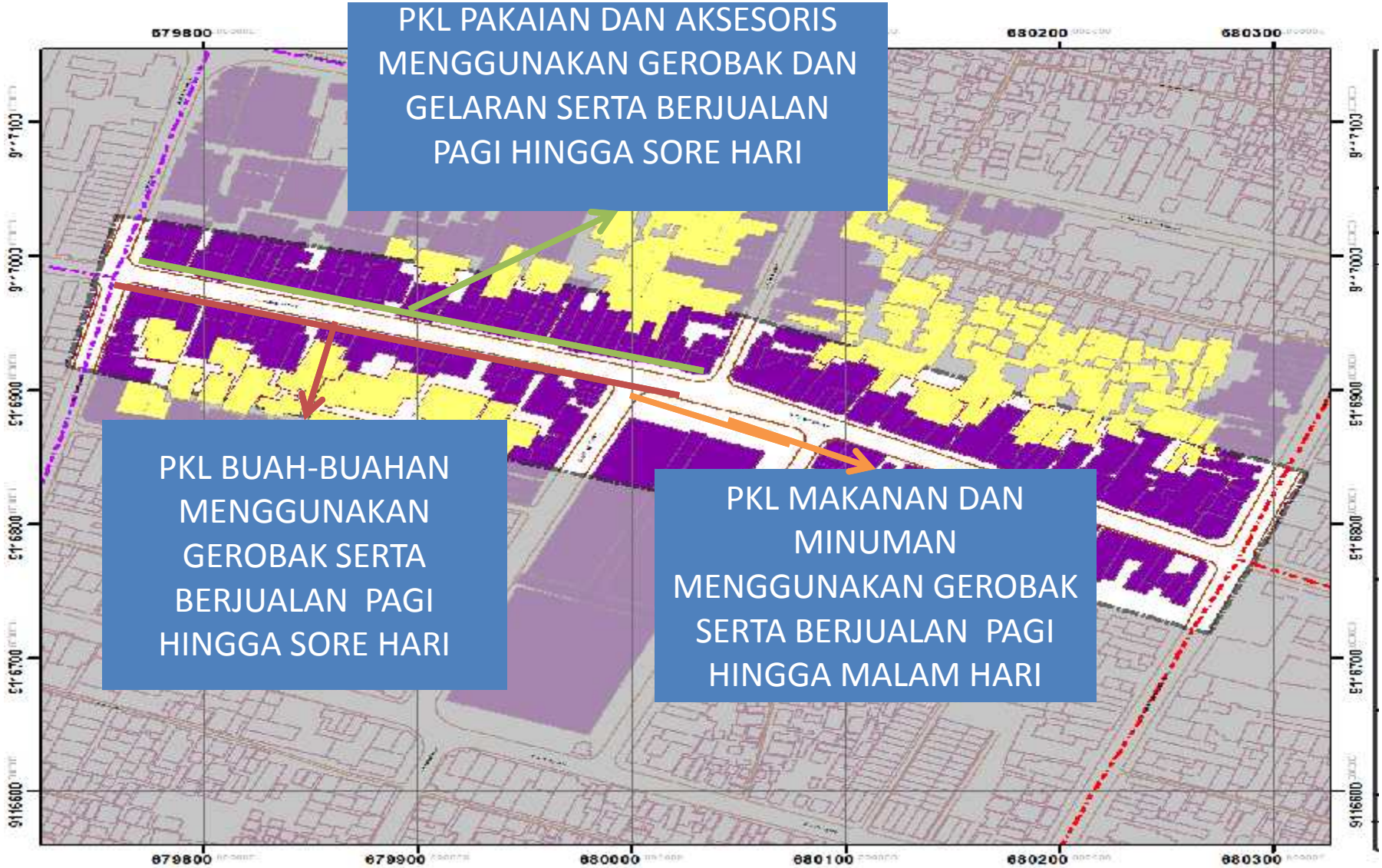

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PENATAAN PKL

1. **Pentinganya pengaturan usaha bagi PKL untuk ketertiban, keindahan dan keamanan kota**
2. **Rendahnya Kebersihan Pada Lokasi berdagang PKL**
3. **Tingginya tingkat kemacetan yang disebabkan oleh keberadaan PKL yang menggunakan bahu jalan**
4. **Tidak terdapatnya perizinan yang jelas untuk berdagang**
5. **belum terdapatnya Pembinaan dan penyuluhan oleh pemerintah bagi PKL untuk kegiatan berdagang.**
6. **Pentinganya kerjasama bagi PKL oleh pemerintah untuk mendorong kerjasama yang saling menguntungkan.**
7. **Rendahnya interaksi pemerintah dengan PKL terakait aktivitas berdagangnya.**
8. **Belum Terdapat isentif dan disentif terhadap keberadaan PKL**
9. **belum terdapatnya Jaminan perlindungan bagi PKL untuk kegiatan berdagang.**
10. **Belum Terdapatnya fasilitas umum yang memadai**

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

INPUT		Merumuskan Arahan			
Faktor	Variabel	PKL Makanan dan Minuman	PKL Buah	PKL Pakaian	PKL Kebutuhan Tersier
Pentinganya pengaturan usaha bagi PKL untuk ketertiban, keindahan dan keamanan kota	Jenis Sarana Berdagang	Pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman menggunakan rombong/gerobak dan tenda yang mudah dibongkar pasang, meja dan kursi dengan bentuk dan warna yang seragam.	Pedagang kaki lima yang menjual Buah menggunakan rombong/gerobak dan tenda yang mudah dibongkar pasang, meja dan kursi dengan bentuk dan warna yang seragam.	Pedagang kaki lima yang menjual pakaian menggunakan rombong/gerobak dan meja dengan model yang sama.	Pedagang kaki lima yang menjual kebutuhan tersier menggunakan rombong/gerobak dan meja dengan model yang sama.
	Jenis pedagang menurut sifat	Pedagang kaki Lima Makanan dan Minuman diarahakan untuk berdagangg menetap di depan Pasar Besar.	Pedagang kaki Lima Makanan dan Minuman diarahakan untuk berdagang menetap pada Jalan Pasar Besar bagian Selatan dengan menggunakan satu sisi timur saja	Pedagang kaki Lima pakaian diarahakan untuk berdagang menetap pada Jalan Pasar Besar bagian Selatan dengan menggunakan satu sisi barat saja	Pedagang kaki Lima kebutuhan tersier diarahakan untuk berdagang menetap pada Jalan Pasar Besar bagian utara.
	Luas Lapak	Pedagang kaki lima makanan dan minuman yang berdagang didepan Pasar Besar hanya 3 - 4 m^2	Pedagang kaki lima buah yang berdagang didepan Pasar Besar hanya 2 - 3 m^2	Pedagang kaki lima buah yang berdagang didepan Pasar Besar hanya 1 - 3 m^2	Pedagang kaki lima kebutuhan tersier yang berdagang pada Koridor Jalan Pasar Besar segmen utara hanya 1 - 2 m^2
	Jam Operasional	1. Pedagang kaki Lima yang berdagang makanan dan minuman dapat berjualan mulai pukul 10.00 – 22.00	1. Pedagang kaki Lima yang berdagang buah dapat berjualan mulai pukul 09.00 – 17.00	Pedagang kaki Lima yang berdagang pakaian dapat berjualan mulai pukul 09.00 – 17.00	Pedagang kaki Lima yang berdagang aksesoris dapat berjualan mulai pukul 09.00 – 17.00

REKOMENDASI

Dalam penataan PKL pengambilan kebijakan hendaknya pemerintah melalukan kajian dari sosial ekonomi dan sosial masyarakat setempat

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Malang dalam menyusun kebijakan/ regulasi sehingga dalam pengelolaanya dan penataan PKL tidak terjadi konflik dan memiliki kejelasan lokasi sebelum melakukan penataan

TERIMA KASIH

PREVIEW SIDANG PEMBAHASAN

ARAHAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA KORIDOR PASAR BESAR KOTA MALANG

OLEH : AKHMAD RADITYA M.F

NRP : 3611100002

DOSEN PEMBIMBING : DIAN RAHMAWATI ST. MT.

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2015

- Untuk merumuskan arahan penataan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan dengan teknik analisisa Delphi. Teknik analisis Delphi adalah teknik suatu usaha untuk memperoleh konsesnsus *group* yang dilakukan secara kontinyu sehingga diperoleh konvergensi opini Responden yang digunakan dalam mermuskan arahan dalam penataan PKL yang dihasilkan dari analisa stakeholder.
- Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah metode analisis Delphi akan dijelaskan sebagai berikut :
- Wawancara stakeholder
- Stakeholder yang dimaksudkan disini ialah stakeholder yang telah ditentukan dalam sampel penelitian. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui apakah arahan yang telah dibuat dengan menggunakan metode triangulasi dapat digunakan ataukah masih ada penambahan, sehingga diuji kebenarannya .
- Reduksi dan Tampilan Data Hasil Wawancara
- Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas, dan mentranformasikan data dari transkrip hasil wawancara eksplorasi dengan stakeholder. Dari ringkasan hasil wawancara dan proses reduksi maka didapatkan arahan dalam penataan PKL berdasarkan pendapat para ahli
- Iterasi dan Penarikan Kesimpulan
- Iterasi ditujukan untuk memastikan apakah instrument hasil wawancara sesuai dengan maksud yang diberikan oleh masing-masing stakeholder. Dari hasil identifikasi instrument berdasarkan opini tiap-tiap stakeholder tersebut kemudian disederhanakan atau dikelompokan secara substansial. Terhadap instrument lain yang belum disebutkan oleh semua stakeholder akan dilakukan *cross check* terhadap responden lainya. Berikut adalah tahapan-tahapanya dalam melakukan analisa delphi :

Bagan Alur

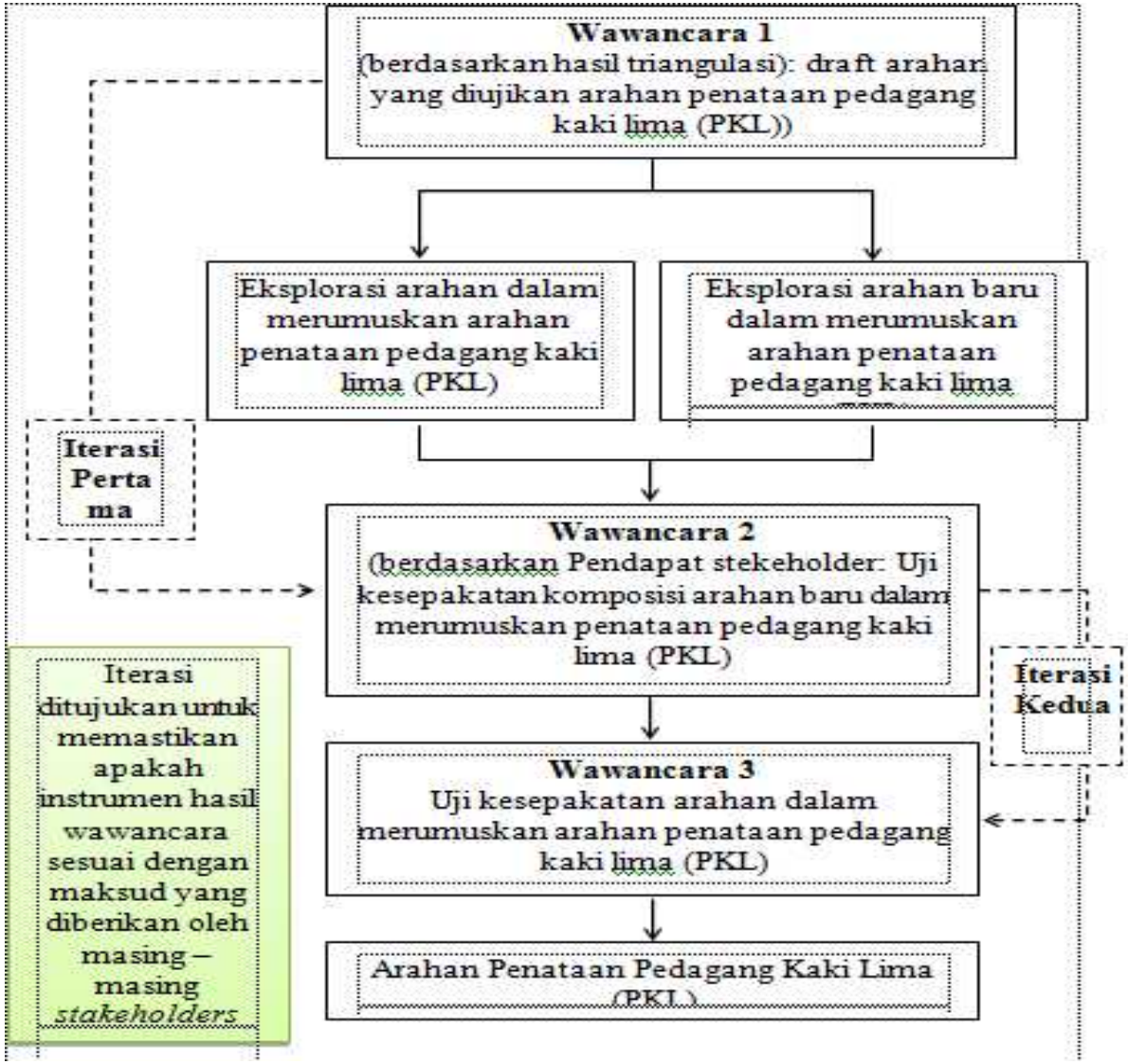
Wawancara 1
(berdasarkan hasil triangulasi): draft arahan yang diujikan arahan penataan pedagang kaki lima (PKL))
Eksplorasi arahan dalam merumuskan arahan penataan pedagang kaki lima (PKL)
Eksplorasi arahan baru dalam merumuskan arahan penataan pedagang kaki lima
Iterasi Pertama
Wawancara 2
(berdasarkan Pendapat stekeholder: Uji kesepakatan komposisi arahan baru dalam merumuskan penataan pedagang kaki lima (PKL)
Iterasi Kedua
Iterasi ditujukan untuk memastikan apakah instrumen hasil wawancara sesuai dengan maksud yang diberikan oleh masing – masing stakeholders
Wawancara 3
Uji kesepakatan arahan dalam merumuskan arahan penataan pedagang kaki lima (PKL)
Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Faktor	Draft Arahan	Responden yang tidak setuju
Tingginya tingkat kemacetan yang disebabkan oleh keberadaan PKL yang menggunakan bahu jalan	Pedagang kaki lima diwajibkan menempatkan dan menuyusun barang dagangan dengan teratur pada batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan.	R3
Tidak terdapatnya perizinan yang jelas untuk berdagang	Menertibkan pedagang kaki lima dengan memberikan kartu tanda daftar usaha	R1 dan R3
	Memberikan ijin dengan memperbolehkan berjualan pada trotoar dengan syarat menggunakan satu sisi jalan saja sebagai lokasi berjualan	R1, R3 dan R6
	Memberikan uzaha dengan membatasi jam-jam tertentu (diluar peak hour) atau hari-hari teretntu agar tidak mengganggu keamanan dan kenyaman pengguna jalaan	R3 dan R6
Pentinganya pengaturan usaha bagi PKL untuk ketertiban, keindahan dan keamanan kota.	Pembatasan jam operasional berdagang agar tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban pada lingkungan sekitar	R3 dan R6
Belum Terdapat isentif dan disentif terhadap keberadaan PKL	Pemerintah mendorong pedagang kaki lima agar menjadi salah satu tujuan pariwisata yang nantinya dapat menambah PAD dan kesejahterraan masyarakat	R3
belum terdapatnya Jaminan perlindungan bagi PKL untuk kegiatan berdagang	Pemerintah memberikan tanda daftar usaha yang berfungsi sebagai inij resmi berdagang dari pemerintah.	R3
	Pemerintah memberikan pertaruran dan jaminan kepada PKL terkait usaha berdagang.	R3

Faktor	Draft Arahan	Responden yang Tidak Setuju
Tidak terdapatnya perizinan yang jelas untuk berdagang	Menertibkan pedagang kaki lima dengan memberikan kartu tanda daftar usaha	R3
	Memberikan ijin dengan memperbolehkan berdagang pada trotoar dengan syarat menggunakan satu sisi jalan saja sebagai lokasi berdagang	R3